

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH**e-ISSN: 2502 – 4205***Vol.6., No.1, April 2021*<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>**Studi Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang di Bajo Barat dan Bajo Timur****Study of Slum Level Classification in Boepinang Slum Area In West Bajo and East Bajo****Semuel Kadmaerubun^{1*)}, La Baco Sudia²⁾, La Ode Ahmad Nur Ramadhan³⁾**¹⁾Programstudi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo²⁾Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo³⁾Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Halu Oleo**ABSTRACT**

Slum areas are always a concern because of the quality of the environment that is not healthy. The method used is descriptive analysis and quantitative analysis. The results of this research are the existing conditions of slum areas in Boepinang Bajo Barat and Bajo Timur, namely: (1) the area of the slum area reaches 10.32 hectares with (a) the area of the West Bajo slum area is 4 Ha; (b) the area of the slum area of East Bajo is 6.32 Ha. Slum areas in Boepinang (East Bajo) and West Boepinang (West Bajo) Villages are included in priority scale one (1). Need attention in settlement management.

Keywords ; West Bajo, East Bajo, Slum, Settlements

ABSTRAK

Permukiman kumuh selalu menjadi perhatian karena dari segi kualitas lingkungan yang tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi eksisting Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur dan untuk mengidentifikasi klasifikasi tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu Kondisi eksisting Kawasan kumuh di Boepinang Bajo Barat dan Bajo Timur sebagai berikut : (1) luas kawasan kumuh mencapai 10,32 Ha dengan (a) luas Kawasan kumuh Bajo Barat 4 Ha; (b) luas Kawasan kumuh Bajo Timur 6,32 Ha. Kawasan kumuh di Kelurahan Boepinang (Bajo Timur) dan Boepinang Barat (Bajo Barat) masuk skala prioritas satu (1). Perlu Perhatian dalam pengelolaan permukiman.

Kata Kunci ; Bajo Barat, Bajo Timur, Kumuh, Permukiman

PENDAHULUAN

Pemenuhan 0% Kawasan kumuh merupakan bagian dari target SDG's poin 6 (Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau bagi semua). Dalam menjawab tantangan tersebut pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membuat program 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang

terkandung dalam visum PUPR 2030 (100% hunian cerdas di wilayah perkotaan). Permukiman kumuh mempunyai masalah yang bersifat kompleks diantaranya yaitu pembiaran berkembangnya ruang-ruang marginal perkotaan, lemahnya pengelolaan kota, belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan dan persediaan rumah secara utuh dan partisipatif, dan belum adanya pengembangan sistem penyediaan perumahan secara utuh (Conyers & Hills, 1990 dalam Wijaya, 2016). Namun demikian

masih banyak kawasan yang masih dalam kategori kumuh seperti kawasan kumuh Boepinang Bajo Timur dan Bajo Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Permukiman kumuh selalu menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Putro, 2011)

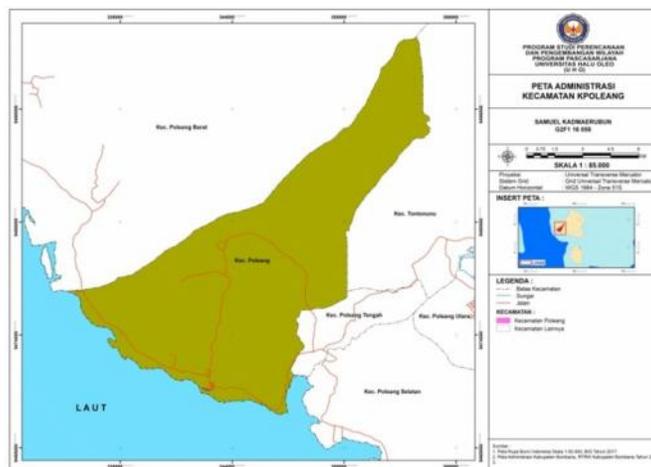
Kawasan kumuh Boepinang Bajo Timur dan Bajo Barat berdasarkan SK kumuh no 208 Tahun 2014 masuk dalam kategori kumuh berat dengan luas total mencapai 7,13 Ha. Tipologi kawasan kumuh boepinang adalah pesisir atau tepi air dan merupakan bagian dari kawasan Ibu Kota Kecamatan Poleang. Karakteristik kawasan permukiman kumuh Boepinang Bajo Timur dan Bajo Barat secara umum memiliki mata pecaharian sebagai nelayan yang artinya sumber pendapatan dari masyarakat nelayan bajo timur dan bajo barat adalah hasil laut, baik ikan, taripang, dan lain - lain. Permukiman yang terdapat pada kawasan inipun terbilang masih kumuh, dimana rumah – rumah masyarakat bajo masih bentuk rumah tinggi, berdinding papan, bahkan masih beratap rumbia. Hal lain menjadi perhatian peneliti adalah Keberadaan masyarakat suku bajo masih tetap mempertahankan budayanya khususnya diwilayah perkotaan (ibu kota kecamatan) menjadi sebuah persoalan dalam perkotaan, dimana kawasan masyarakat Bajo ini menjadi bagian penting dalam pengembangan wilayah kawasan perkotaan secara khusus maupun pengembangan kawasan keseluruhan wilayah dan sangat berdampak pada

kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Bajo. Permasalahan utama yang terjadi adalah masalah sanitasi, air minum, jalan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat (PHBS), laju pertumbuhan penduduk, daya tampung dan daya dukung wilayah. Sehingga diperlukan penanganan dalam bentuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan menggunakan tujuh (7) indikator kekumuhan yaitu : (1) bangunan gedung; (2) jalan lingkungan; (3) drainase; (4) air minum; (5) air limbah; (6) persampahan; (7) proteksi kebakaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana kondisi *existing* Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur dan bagaimana klasifikasi tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konfigurasi struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Lokasi penelitian berada Kelurahan Boepinang dan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Teknik Analisis Data

Berdasarkan perolehan data primer maupun data sekunder, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan

keterkaitan dan pengaruh antar variabel yang diperoleh. Analisis deskriptif digunakan sebagai cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang ditemukan selama penelitian dilakukan. Analisis ini

diarahkan pada uraian deskriptif mengenai bagaimana kondisi dan mekanisme perkembangan permukiman Bajo Timur dan Bajo Barat serta

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel, indikator, jenis dan sumber data beserta analisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Metode Analisa

No	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Variabel	Jenis dan Sumber Data	Metode Analisis Data
1	Bagaimana kondisi <i>existing</i> Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur ?	Aspek teknis dan aspek non teknis	(1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan.		Data Primer yaitu hasil observasi dan pengukuran (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan.	Analisis Deskriptif
2	Bagaimana klasifikasi tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur ?	Aspek teknis dan aspek non teknis	(1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan.		Data Primer yaitu hasil observasi dan pengukuran (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan.	Analisa Kuantitatif

Sumber: Pengolahan Data

Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi

Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot

kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria (Tabel 2). Klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdapat 18 kemungkinan klasifikasi sehingga dapat ditentukan skala prioritas penanganan kawasan kumuh (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabel 2. Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan

No.	Nilai	Keterangan
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan		
1	71 – 95	Kumuh Berat
2	45 – 70	Kumuh Sedang
3	19 – 44	Kumuh Ringan
B. Identifikasi Legalitas Lahan		
1	(+)	Status Lahan Legal
2	(-)	Status Tidak Lahan Legal
C. Identifikasi Pertimbangan Lain		
1	7 – 10	Pertimbangan Lain Tinggi
2	4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang
3	1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut :

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Tabel 3. Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

Aspek Fisik	Lahan	Pertimbangan Lain	Klasifikasi Kumuh	Skala Prioritas
Berat	Lahan Legal	Tinggi	A1	1
Berat	Lahan Tidak Legal	Tinggi	A2	1
Berat	Lahan Legal	Sedang	A3	4
Berat	Lahan Tidak Legal	Sedang	A4	4
Berat	Lahan Legal	Rendah	A5	7
Berat	Lahan Tidak Legal	Rendah	A6	7
Sedang	Lahan Legal	Tinggi	B1	2
Sedang	Lahan Tidak Legal	Tinggi	B2	2
Sedang	Lahan Legal	Sedang	B3	5
Sedang	Lahan Tidak Legal	Sedang	B4	5
Sedang	Lahan Legal	Rendah	B5	8
Sedang	Lahan Tidak Legal	Rendah	B6	8
Ringan	Lahan Legal	Tinggi	C1	3
Ringan	Lahan Tidak Legal	Tinggi	C2	3
Ringan	Lahan Legal	Sedang	C3	6
Ringan	Lahan Tidak Legal	Sedang	C4	6
Ringan	Lahan Legal	Rendah	C5	9
Ringan	Lahan Tidak Legal	Rendah	C6	9

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 4. Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data		
A.	Identifikasi Kondisi Kekumuhan	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi	
					51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3		
					25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1		
		Tingkat Kepadatan Bangunan) KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;) KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau) Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha) untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi		
				51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3			
				25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1			
				Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: pengendalian dampak lingkungan	5			
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan) pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum) keselamatan bangunan gedung) kesehatan bangunan gedung) kenyamanan bangunan gedung) kemudahan bangunan gedung	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi		
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1			
				76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5			Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3			
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1					
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi			
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
			Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi			
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		Wawancara, Format Isian, Observasi		
51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya			3					
			25% - 50% populasi tidak	1				

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
				terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya		
	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun				3		
25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun				1		
	Ketidakterersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan				3		
25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan				1		
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya				3		
25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya				1		
	Tidak Terpeliharanya Drainase) Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:) pemeliharaan rutin; dan/atau) pemeliharaan berkala) Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:) pemeliharaan rutin; dan/atau) pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau				3		
25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau				1		
	Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk				3		
25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk				1		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis				3		
25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai				1		

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none">) Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:) kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik) tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	standar teknis 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none">) Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:) tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;) tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;) gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none">) Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:) pew adahan dan pemilahan domestik;) pengumpulan lingkungan;) pengangkutan lingkungan;) pengolahan lingkungan 	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">) Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:) pemeliharaan rutin; dan/atau) pemeliharaan berkala 	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 25% - 50% area sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	Kondisi Proteksi Kebakaran	Kondisi Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">) Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:) pasokan air;) jalan lingkungan;) sarana komunikasi;) data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan) bangunan pos kebakaran 	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">) Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);) mobil pompa;) mobil tangga sesuai kebutuhan; dan) peralatan pendukung lainnya 	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
B. Identifikasi Legalitas Lahan						
	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	<ul style="list-style-type: none">) Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau) kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah 	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
				Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
				Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	
				Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. Identifikasi Pertimbangan Lain						
	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	<ul style="list-style-type: none">) Pertimbangan Letak lokasi perumahan atau permukiman pada:) fungsi strategis kabupaten/kota; atau) bukan fungsi strategi kabupaten/kota 	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
				Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1	
		Kependudukan	<ul style="list-style-type: none">) Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 	<u>Untuk Kota Metropolitan</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
				<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	3	
				Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 150-200 Jiwa/Ha	3	
				Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">) Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
				Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	1	
				potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;		
				potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;		
		potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat				

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

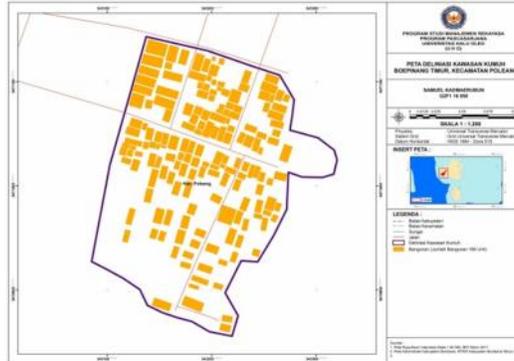
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelurahan Boepinang (Bajo Timur)

Secara astronomis Letak Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang terletak pada 4°47'02,08" Lintang Selatan dan 121°35'10,43" Bujur Timur. Secara Administratif Kelurahan Boepinang terdiri atas 5 dusun/lingkungan, dengan luas wilayah Kelurahan sebesar 4,22 km² dan luas wilayah kawasan kumuh sebesar 4 Ha atau sekitar 0,948 %

dari luas wilayah kelurahan Boepinang secara keseluruhan. Sedangkan jarak kelurahan Boepinang ke ibukota kecamatan sebesar 0,5 km.

Kelurahan Boepinang adalah salah satu kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Karakteristik Kelurahan Boepinag merupakan permukiman yang berada di wilayah pesisir dan di atas air dengan kegiatan utama masyarakat di bidang perikanan, perdagangan dan jasa.



Gambar 2. Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang

Kondisi Fisik Kawasan

Kajian mengenai permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga hal, yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim dipermukiman, dan dampak oleh kedua kondisi tersebut (Santosa, 2007). Penelitian memfokuskan pada kondisi fisik kawasan.

Kondisi fisik tampak dari aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.

Luas kawasan permukiman kumuh kawasan Boepinang berdasarkan delineasi kawasan adalah ± 4 Ha, sedangkan berdasarkan SK Kumuh No 208 tahun 2014 luas kawasan kumuh adalah 1,59 Ha. Data-data kondisi kekumuhan kawasan permukiman kumuh kawasan Boepinang ditinjau dari indikator diperoleh dari survei lapangan. Adapun kondisi fisik kawasan Boepinang dijabarkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Kondisi Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang (Bajo Timur)

Aspek	Kriteria	Parameter	Persentase		Keterangan
Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	95%	157	Unit
	Tingkat kepadatan bangunan	bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	37%	61	Unit
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis	bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	87%	144	Unit
Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	38%	63	Unit
	Kualitas permukaan jalan	area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	91%	440	m

Aspek	Kriteria	Parameter	Persentase		Keterangan
Drainase	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	96%	155	m
	Ketidakterediaan drainase	area tidak tersedia drainase lingkungan	44%	71	m
	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	71%	115	m
	Tidak terpeliharanya drainase	area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	95%	154	m
	Kualitas konstruksi drainase	area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk	85%	138	m
Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	52%	86	SR
	Keterhubungan dengan sistem drainase kota	populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	47%	78	SR
Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	86%	142	Unit
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	82%	135	Unit
Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	97%	160	Unit
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	67%	111	Unit
	Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	97%	160	Unit
Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	90%	149	Unit
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	100%	165	Unit

Sumber : Hasil Analisis, 2020

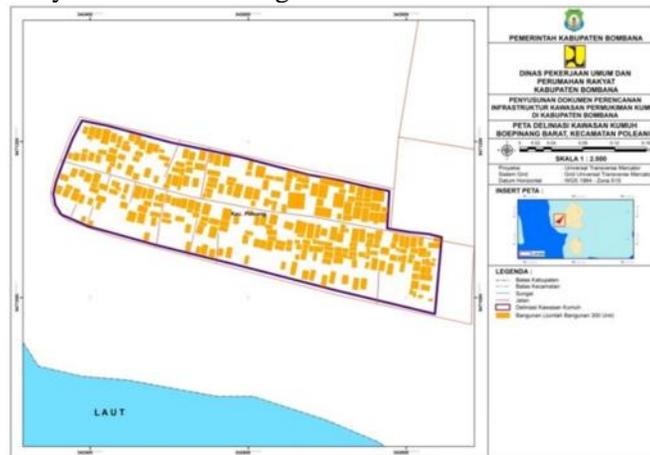
2. Kelurahan Boepinang Barat (Bajo Barat)

Secara astronomis Letak Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang Barat terletak pada 4°47'00,98" Lintang Selatan dan 121°34'52,46" Bujur Timur. Secara Administratif Kelurahan Boepinang Barat terdiri atas 5 dusun/lingkungan, dengan luas wilayah Kelurahan sebesar 4,64 km² dan luas wilayah kawasan kumuh sebesar 6,32 Ha

atau sekitar 1,362 % dari luas wilayah kelurahan Boepinang Barat secara keseluruhan. Sedangkan jarak kelurahan Boepinang Barat ke ibukota kecamatan sebesar 0,5 km. Kelurahan Boepinag Barat adalah salah satu kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Karakteristik Kelurahan Boepinag Barat merupakan permukiman

yang berada di wilayah pesisir dan di atas air dengan kegiatan utama masyarakat di bidang

perikanan, perdagangan dan jasa (Gambar 3).



Gambar 3. Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang Barat
Sumber : Hasil Pemetaan, 2020

Kondisi Fisik Kawasan

Permukiman kumuh dalam kaitannya dengan masalah perkotaan, apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan yang tidak memadai, sedangkan kondisi geografisnya layak untuk dihuni, bersifat legal atau secara hukum diakui kepemilikannya (Drakakish, 2020 dalam Syamsiar, 2020) aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.

Luas kawasan permukiman kumuh kawasan Boepinang Barat berdasarkan delineasi kawasan adalah ± 6,32 Ha sedangkan berdasarkan SK Kumuh No 208 tahun 2014 luas kawasan kumuh adalah 5,54 Ha. Data-data kondisi kekumuhan kawasan permukiman kumuh kawasan Boepinang Barat ditinjau dari indikator diperoleh dari survey lapangan. Adapun kondisi fisik kawasan Boepinang dijabarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase Kondisi Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang Barat (Bajo Barat)

Aspek	Kriteria	Parameter	Persentase		Keterangan
Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	93%	265	Unit
	Tingkat kepadatan bangunan	bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	38%	108	Unit
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis	bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	85%	242	Unit
Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	36%	103	Unit
	Kualitas permukaan jalan	area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	89%	1187	m
Drainase	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	71%	947	m
	Ketidakterediaan drainase	area tidak tersedia drainase lingkungan	51%	680	m
	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	67%	894	m
	Tidak terpeliharanya drainase	area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	73%	974	m
	Kualitas konstruksi drainase	area memiliki kualitas konstruksi drainase	74%	987	m

Aspek	Kriteria	Parameter	Persentase		Keterangan
		lingkungan buruk			
Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	53%	151	SR
	Keterhubungan dengan sistem drainase kota	populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	51%	145	SR
Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	87%	248	Unit
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	80%	228	Unit
Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	95%	271	Unit
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	67%	191	Unit
	Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	89%	254	Unit
Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	90%	257	Unit
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	100%	285	Unit

Sumber : Hasil Analisis, 2020.

3. Perbandingan Delinasi Kawasan Kumuh Boepinang dan Boepinang Barat

Delinasi kawasan kumuh Boepinang (Bajo Timur) dan Boepinang Barat (Bajo Barat) dilakukan dengan survey lapangan menggunakan foto drone

yang diolah menjadi citra untuk selanjutnya dilakukan delinasi sehingga diperoleh hasil luasan kawasan kumuh. Hasil delinasi tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil delinasi berdasarkan SK Kumuh No 208 tahun 2014 (Tabel 7).

Tabel 7. Perbandingan Hasil Delinasi Kawasan Kumuh

SK No. 208 Tahun 2014			Hasil Delinasi		
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh Sesuai SK (Ha)	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
Poleang	Boepinag Barat	5.54	Poleang	Boepinag Barat	6.32
	Boepinag	1.59		Boepinag	4
Total Kawasan 1		7.13	Total Kawasan 1		10.32

Sumber : SK Kumuh No 208 Tahun 2014 dan hasil Survey (diolah).

Berdasarkan Tabel 8 perbandingan hasil delinasi kawasan kumuh antara delinasi hasil SK kumuh dan hasil delinasi survei di lapangan didapati terjadi perbedaan. Luas delinasi kawasan kumuh hasil survey lebih luas daripada hasil delinasi

berdasarkan SK kumuh. Hal diakibatkan oleh berkembangnya wilayah permukiman dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Adapun perbedaan luasannya adalah 3,19 Ha (Gambar 4 dan 5).



Gambar 4. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di Boepinang Barat (Bajo Barat)



Gambar 5. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di Boepinang (Bajo Timur)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah memberikan kriteria kekumuhan. Berdasarkan hal tersebut maka pada Tabel 8 merupakan klasifikasi tingkat kekumuhan di Kelurahan Boepinang (Bajo Timur) dan Boepinang barat (Bajo Barat) dengan kriteria identifikasi

kondisi kekumuhan adalah kumuh berat, lalu kriteria legalitas lahan masuk dalam kategori klasifikasi lahan tidak legal, dan kriteria pertimbangan lain masuk dalam klasifikasi A2 sehingga dapat disimpulkan kawasan kumuh di **Kelurahan Boepinang dan Boepinang barat masuk skala prioritas satu (1).**

Tabel 8. Hasil Identifikasi Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

Aspek	Kriteria	Poleang	
		Boepinang (Bajo Timur)	Boepinang Barat (Bajo Barat)
Identifikasi Kondisi Kekumuhan			
Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	5	5
	Tingkat kepadatan bangunan	1	1
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis	5	5
Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	1	1
	Kualitas permukaan jalan	5	5
Drainase	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	5	3
	Ketidakterediaan drainase	1	3
	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	3	3
	Tidak terpeliharanya drainase	5	3
	Kualitas konstruksi drainase	5	3
Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	3	3
	Keterhubungan dengan sistem drainase kota	1	3
Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	5	5
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	5
Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	5
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	3	3
	Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	5	5
Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	5	5
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	5	5
Total		73	71
Kategori Klasifikasi		Berat	Berat
Legalitas Lahan			
Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	-1	-1
	Kesesuaian zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	1	1
	Kepemilikan IMB Bangunan	-1	-1
	Total	-1	-1
	Kategori Klasifikasi		Lahan Tidak Legal
Pertimbangan lain			
Pertimbangan lain	Nilai strategis lokasi	5	5
	Kependudukan	3	3
	Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	5	5
	Total	13	13
	Kategori Klasifikasi		Tinggi
Klasifikasi Kekumuhan		A2	A2
Skala Prioritas		1	1

Sumber : Hasil Analisis 2020

Penanganan permukiman kumuh pada Tabel 8 di Bajo Barat dan Bajo Timur menghasikan A2 yaitu lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal. Para ahli mempunyai pandangan mengenai pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan persebarannya. Adapun pilihan-pilihan yang ditawarkan yaitu, (1) melakukan perbaikan dan pemugaran, peremajaan dan relokasi. Hal ini dinamakan sebagai penanganan terpadu (Emerson, 2011); (2) melakukan penataan permukiman kumuh (Supriyatno, 2014); (3) Penerapan konsep

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (Daljoeni, 1997 dalam Sutiarti (2006), Hardian (2016); (4) Redevelopment (Priatmodjo (2003) dalam Hasni, 2010; (5) melaksanakan revitalisasi baik dari keadaan fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya) (Nuissl dan Heinrichs (2013).

KESIMPULAN

Kondisi eksisting Kawasan kumuh di Boepinang Bajo Barat dan Bajo Timur sebagai berikut : (1) luas kawasan kumuh mencapai 10,32

Ha dengan (a) luas Kawasan kumuh Bajo Barat 4 Ha; (b) luas Kawasan kumuh Bajo Timur 6,32 Ha. Kawasan kumuh di Kelurahan Boepinang dan Boepinang barat masuk skala prioritas satu (1).

Ucapan Terima Kasih: Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya masyarakat Kawasan Kumuh Boepinang di Bajo Barat dan Bajo Timur sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan berbagai kendala dapat dihadapi dan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Emerson, K.Nabatchi T., Balogh S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*. Access published May 2.
- Hasni. (2010). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPRH. Jakarta: Rajawali Pers
- Nuissl, H., Heinrichs, D. (2013). Slums: perspectives on the definition, the appraisal and the management of an urban phenomenon. *Journal of the Geographical Society of Berlin*. 144(2).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Putro D.J. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, 11(1).
- Santosa, D. P. (2007). Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Supriyatno, Budi. (2014). Role of Government in Jakarta Organize Slum Area. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 2(5)
- Sutiarti, Eny Endang. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi kasus pada kawasan pancuran Kota Salatiga). Tesis. Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
- Syamsiar, Nur Ratika, Batara Surya, Syahriar Tato. (2020). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene). *URSI*, 2(2) : 54-65
- Wijaya, Donny Wahyu. (2016). Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan pemukiman kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 2(1) : 1-10.